

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA MALIGANO
KECAMATAN MALIGANO KABUPATEN MUNA**

**MERI AFIAT
Rahman
La Ode Muh. Elwan**

Meriafiat@gmail.com

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2018**

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) Tingkat partisipasi masyarakat di desa Maligano kecamatan Maligano Kabupaten Muna suda cukup dilaksanakan dengan baik namun ditingkat partisipasi perencanaan program masi perlu ditingkatkan. Adapun 3 dimensi tersebut yaitu: (a) dimensi partisipasi masyarakat dalam perencanaan program dalam dimensi ini masyarakat di desa maligano perlu meningkatkan lagi partisipasi perencanaan program keluarga berencana. (b) dimensi partisipasi pelaksanaan program dengan jawaban responden dan informan kategori baik artinya masyarakat suda melaksanakan dengan partisipasi yang baik. (c) demensi partisipasi dalam menikmati hasil program dengan jawaban responden dan informan dalam kategori baik, artinya masyarakat di desa maligano merasakan manfaat dari program keluarga berencana tersebut. (2) pelaksanaan program keluarga berencana di desa Maligano kecamatan Maligano Kabupaten Muna. Adapun dimensi tersebut yaitu: (a) Dimensi Alat Kontra sepsi Pil banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa maligano. (b) Dimensi Alat Kontrasepsi Suntik tanggapan responden dengan kategori baik. Artinya metode kontrasepsi suntik banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyrakat desa maligano (c) Dimensi Alat Kontrasepsi Kondom Tanggapan responden dengan kategori baik. Artinya metode metode kontrsepsi kondom banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa maligano. (d) Dimensi Alat Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) tanggapan responden dengan kategori baik. Artinya metode kontrasepsi alat IUD banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa maligano. (e) Dimensi Alat Kontrasepsi Impalan tanggapan responden dengan kategori baik. Artinya metode kontrasepsi impalan banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa maligano . (f) Dimensi Alat Kontrasepsi Diafragma tanggapan responden dengan kategori kurang baik. Artinya metode kontrasepsi diafragma kurang digunakan oleh masyarakat desa maligano. (g) Dimensi Alat Kontrasepsi Diafragma tanggapan responden dengan kategori kurang baik. Artinya metode kontrasepsi diafragma kurang digunakan olrh masyarakat desa maligano.

Katakunci: Tingkat Partisipasi Dan Program KB

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas tinggi merupakan salah satu modal atau aset dalam pembangunan sebuah negara. Penduduk sebagai asset apabila penduduk memberikan kontribusi dari segi fisik maupun mental dalam pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar berusia muda, berkualitas rendah akan menjadi beban suatu negara, karena menghambat laju pembangunan dan menimbulkan berbagai masalah sosial.

Siagian (1994: 102) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai :

“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Berdasarkan dari beberapa pengertian partisipasi masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkontribusi dalam hal fisik maupun nonfisik dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi pembangunan.

Said (1994: 34) Jumlah penduduk yang besar adalah akibat dari tingkat fertilitas yang tinggi, karena tingkat usia subur atau jumlah wanita usia suburnya tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk menjadi tinggi. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah sebesar 1,49% atau bertambah sekitar 3-4 juta orang per tahun. Konsekuensi dari besarnya jumlah penduduk, maka praktis kebutuhan akan berbagai fasilitas seperti lapangan pekerjaan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan rekreasi juga meninggi, dan harus disediakan oleh pemerintah. Jika tidak, maka sangat bisa dipastikan bahwa penduduk negara tersebut akan memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah. Akibatnya akan banyak timbul masalah sosial di masyarakat, seperti pengangguran, kriminalitas, gelandangan, rendahnya kualitas kesehatan, minimnya akses pendidikan, serta kekurangan bahan pangan atau gizi buruk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dikemukakan oleh penulis dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Desa Maligano Kecamatan Maliganno Kabupaten Muna?
2. Bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Maligano Kecamatan Maliganno Kabupaten Muna?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu Administrasi Negara secara umum serta pemerintah daerah secara khusus.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah yang membidangi program keluarga berencana dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Masyarakat

1. Defenisi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terdiri atas dua suku kata, yaitu partisipasi dan masyarakat. Secara etimologi, partisipasi berasal dari Bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/ pengikutsertaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi selama ini diperlukan sebagai masukan bagi proses pembangunan, sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan sebagai prasyarat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Masyarakat adalah yang mereka anggap sama.

Muluk (2007:52), menyebutkan bahwa :“partisipasi sebagai suatu layanan dasar dan bagian integral dari *local government*, partisipasi publik merupakan alat bagi *good government*. Partisipasi dalam pembangunan didefensikan tidak semata-mata partisipasi dalam pelaksanaan program, rencana, dan kebijakan pembangunan, tetapi juga partisipasi yang emansipatif.

2. Tahapan Partisipasi Masyarakat

Pendekatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui 3 tahapan Slamet, 1994 dan Wulandari (2013:16). Adapun uraian dari ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*)

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan atau proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

b. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implemmentation stage*)

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

c. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*)

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Menurut Isbandi (2007:27) mengemukakan partisipasi masyarakat adalah:

“Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Oakley (1991:1-10) dalam Darmawi (2014: 11) menguraikan partisipasi kedalam tiga bentuk yaitu sebagai berikut :

- a. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu interpretasi dominan dari partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga adalah melihatnya sebagai suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi lainnya dari masyarakat desa menetapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan.
- b. Partisipasi sebagai organisasi, yaitu meskipun diwarnai dengan perdebatan yang panjang di antara para praktisi dan teoritis mengenai organisasi sebagai instrumen yang fundamental bagi partisipasi, namun dapat dikemukakan bahwa perbedaan organisasi dan partisipasi terletak pada hakekat bentuk organisasional sebagai sarana bagi partisipasi, seperti organisasi-organisasi yang biasa dibentuk atau organisasi yang muncul dan dibentuk sebagai hasil dari adanya proses partisipasi. Selanjutnya dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dapat melakukannya melalui beberapa dimensi, yaitu:
 - 1) Sumbangan pikiran (ide atau gagasan).
 - 2) Sumbangan materi (dana, barang, alat).
 - 3) Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja).
 - 4) Memanfaatkan/ melaksanakan pelayanan pembangunan.
- c. Partisipasi sebagai pemberdayaan, yaitu partisipasi merupakan latihan pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit didefinisikan. Akan tetapi, pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Watson (dalam Soetomo, 2008:214), selain faktor-faktor yang mendorong timbulnya partisipasi, juga terdapat beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu, mislanya ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri.

1. Pendekatan Partisipatif

Moelyarto (Kaho 2007: 320) menetapkan partisipasi sebagai konsep strategis pendekatan pembangunan sosial dengan asumsi dasarnya bahwa rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir dari pembangunan. Selanjutnya Kaho (2007:125) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian *intern*

yang memainkan peranan penting dalam setiap penyelenggaraan Otonomi Daerah terutama dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan.

B. Pengertian Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana merupakan suatu program kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam rangka menyikapi perkembangan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Program KB ini adalah program yang dijalankan dengan harapan akan mampu mengendalikan angka kelahiran dan mengatur jarak kehamilan seorang ibu yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap masalah-masalah sosial yang dapat timbul karena banyaknya jumlah penduduk dengan kualitas yang rendah. “Keluarga berencana (KB) artinya mengatur jumlah anak sesuai kehendak, dan menentukan sendiri kapan ingin hamil. Seperti terdapat dalam UU RI No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, secara umum KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak kelahiran, usia ideal melahirkan serta mengatur kehamilan. KB ini dilakukan melalui kegiatan promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi pasangan usia subur untuk dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas.

KB adalah daya dan upaya manusia untuk mengatur atau membatasi kelahiran, baik untuk sementara atau untuk selamanya. Upaya-upaya dalam KB ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keluarga dengan jumlah anak yang tidak banyak serta jarak kelahiran yang ideal tentu akan membuat kehidupan keluarga mampu menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Usia ideal untuk perkawinan yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat bertujuan agar masyarakat mempunyai cukup kesadaran dan kesiapan yang matang dalam perilalkunya sehingga akan mampu pula berpikir secara tepat mengenai masa depan keluarga yang dibangun, meliputi jumlah anak dan jarak kelahiran yang ideal.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Program Keluarga Berencana

Program kebijakan KB dicetuskan oleh pemerintah atas keprihatinan yang timbul karena laju pertumbuhan dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Jika jumlah penduduk terus bertambah tak terkendali, maka hal tersebut akan mengancam kualitas kehidupan dan kesejahteraan manusia di dunia ini. KB dilakukan dengan cara-cara kontrasepsi yang bertujuan untuk mengatur kehamilan. Dengan kontrasepsi masyarakat akan dapat mengatur jumlah anak dan jarak anak yang akan dilahirkan. Program KB diikuti oleh masyarakat khususnya mereka yang termasuk dalam kategori pasangan usia subur (PUS), yaitu pasangan suami istri dimana keduanya masih memiliki kemungkinan untuk menghamili dan hamil. Oleh karena KB akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, maka masyarakat pulalah yang harus berpartisipasi yang tercermin dalam perilaku ber-KB. Partisipasi dalam program KB merupakan partisipasi pada tahap eksekusi (pelaksanaan) terhadap rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

D. Kerangka Pikir

Keberhasilan suatu program dapat di ukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam proses program atau pembangunan tersebut. Bertolak dari dasar

partisipasi maka peran pemerintah memiliki kapasitas yang cukup besar dalam meningkatkan animo partisipasi masyarakat agar lebih berperan secara aktif pada pembangunan di tingkat kelurahan. Dalam penelitian ini, upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pembangunan dapat dilihat pada bagan kerangka pikir.

Sedangkan untuk Partisipasi masyarakat pada Pembangunan dimana indikatornya yaitu ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan dan ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan. (Khairuddin,2005:148)

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna dengan pertimbangan antara lain, bahwa di desa ini masih terdapat masalah kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program keluarga berencana.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijelaskan oleh seorang peneliti didalam penelitiannya. Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara jelas yaitu berkenaan dengan besarnya anggota populasi penelitian yang dicakup.

Dalam mengkaji Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Muna Kecamatan Maligano desa Maligano maka populasi dalam penelitian ini adalah warga yang mengikuti program KB yang berjumlah 100 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Random sampling*. *Random sampling* adalah mengambil sampel dengan secara acak. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang dari total populasi 100 orang.

C. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, terdiri dari jawaban hasil pengisian questioner dan hasil wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen dan laporan yang terkait dengan dipenelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Baik data primer maupun data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Tehnik penelitian ini dimaksudkan untuk mencari dan meneliti literatur berupa buku-buku, majalah yang relevan dengan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dimaksudkan melalui beberapa cara antara lain :

- a. Kuesioner yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis dan terstruktur yang diberikan kepada semua responden tentang hal yang relevan dengan permasalahan penelitian
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara terarah dengan pihak yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai berbagai hal yang relevan dengan penelitian ini. Materi wawancara khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan Desa Wawesa yaitu Kepala Desa, sekretaris dan kaur-kaur serta ketua BPD
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara membaca dan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan obyek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (2013: 332) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Menurut Hamidi (2006: 142) analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak awal turun lokasi melakukan pengumpulan data, dengan cara “mengansur atau membuang” informasi, mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai terakhir memberi interpretasi

F. Definisi Konsep

Berdasarkan uraian-uraian di atas mengenai bentuk partisipasi masyarakat, maka disimpulkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, dapat digolongkan.

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program dapat terbagi dalam beberapa pola sebagai berikut:
 - a) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program.
Perasaan terlibat dalam perencanaan pembangunan harus ditumbuhkan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan akan menumbuhkan kepercayaan kepada diri sendiri terhadap apa yang dibangun
 - b) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.
Dalam pelaksanaan program, terutama pada program fisik yang telah direncanakan bersama, tentu membutuhkan keterlibatan dari segenap masyarakat, karena walaupun telah disusun dengan baik tanpa ada dukungan dalam pelaksanaannya, maka program itu tidak akan berjalan dengan baik
 - c) Partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil program.
Partisipasi masyarakat dapat tumbuh apabila mereka telah menikmati atau memperoleh manfaat dari pembangunan yang dijalankan.
2. Jadi dapat disimpulkan bahwa KB adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat secara sadar dalam mengurangi angka kelahiran dengan tindakan-tindakan pencegahan dan pembatasan kehamilan, serta pengaturan jarak melahirkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Telah diriwayatkan dalam Buku Sejarah terjadinya Negeri Buton dan Negeri Muna , saduran asli Assajaru Haliqa Daarul Bathniy Wal Daarul Munajat, Alih Bahasa oleh Ustaz Akbar Maulana Sayid Abdul Rahman Hadad di Gresik Tahun 1863 Masehi.

Diriwayatkan bahwa Muhammad Ali Idrus menikahi Wa Bira puteri dari Sangia Pure-Pure. Dari perkawinannya tersebut dikaruniai oleh seorang puteri yang diberi nama Wa Nambo Yitinto atau Wa Sala Bose yang hari ini diabadikan menjadi sebuah tempat di Wilaya Desa Langkoroni dan Muhammad Ali Idrus sendiri diberi Gelar Maligano (nama julukan) yang mana Maligani artinya cepat (Bahasa Taloki).

Maligano atau gelaran yang diberikan kepada Muhammad Ali Idrus sejak abad ke XIV atau setelah ditulisa sejarah terjadinya Negeri Buton dan Negeri Muna oleh 10 (Sepuluh) orang. Desa Maligano sendiri dikukuhkan tahun 1966 pada masa pemerintahan Kepala Desa Abu Hanifa. Desa Maligano dulunya bernama Desa Lebo yang diprakarsai oleh 3 (tiga) orang tokoh yaitu La Ode Bariu, La Ode Malik (Kepala sibotu) dan La Dabu (Kepala RK Kauduma).

B. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Program KB.

Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu seperti perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang cacat dan dari kalangan miskin, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan mereka sendiri

C. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB)

Secara umum misi program KB adalah mengupayakan agar masyarakat secara sadar membentuk keluarga kecil yang berkualitas, bahagia, dan sejahtera yang akan menjadi penentu masa depan kehidupan masyarakat melalui anak-anak yang dilahirkannya. Dalam pelaksanaannya, program KB nasional mempunyai target tiga dimensi, yaitu “perluasan jangkauan, pembinaan dan pelembagaan-pembudayaan”. (BKKBN,1985 : 3).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat di Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Munasudah cukup dilaksanakan dengan baik namun ditingkat partisipasi perencanaan program masih perlu ditingkatkan. Adapun 3 dimensi tersebut yaitu: (1) Dimensi partisipasi masyarakat dalam perencanaan program dalam dimensi ini masyarakat di desa maligano perlu meningkatkan lagi partisipasi perencanaan program keluarga berencana. (2). Dimensi Partisipasi Pelaksanaan Program dengan jawaban responden dan informan kategori baik artinya masyarakat sudah melaksanakan dengan partisipasi yang baik. (3) Dimensi Partisipasi dalam menikmati hasil

program dengan jawaban responden dan informan dalam kategori baik, artinya masyarakat di desa maligano merasakan manfaat dari program keluarga berencana tersebut.

2. Pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna. Adapun dimensi tersebut yaitu (1) Dimensi alat kontrasepsi pil tanggapan responden dengan kategori baik. Artinya metode kontrasepsi pil banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa maligano. (2) Dimensi alat kontrasepsi suntik tanggapan responden dengan kategori baik. Artinya metode kontrasepsi suntik banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa maligano. (3) Dimensi alat kontrasepsi kondom tanggapan responden dengan kategori baik. Artinya metode kontrasepsi kondom banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa maligano. (4) Dimensi alat kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) tanggapan responden dengan kategori baik. Artinya metode kontrasepsi Alat Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa maligano. (5) Dimensi alat kontrasepsi implan tanggapan responden dengan kategori baik. Artinya metode kontrasepsi implan banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa maligano. (6) Dimensi alat kontrasepsi diafragma tanggapan responden dengan kategori kurang baik. Artinya metode kontrasepsi diafragma kurang digunakan oleh masyarakat desa maligano. (7) Dimensi alat kontrasepsi diafragma tanggapan responden dengan kategori kurang baik. Artinya metode kontrasepsi diafragma kurang digunakan oleh masyarakat desa Maligano.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa partisipasi pelaksanaan program KB di desa maligano kecamatan maligano kabupaten muna sudah dilakukan dengan baik meskipun ada beberapa yang harus dibenahi, agar dapat ditingkatkan lagi atau paling tidak dipertahankan, hal ini bertujuan agar meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program untuk kepentingan masyarakat.
2. Hendaknya para pegawai BKKBN, pemerintah desa, Petugas pembina dan Pembantu di Posyandu dan terkhususnya masyarakat di desa maligano yang sudah dinilai cukup baik/masih dalam tahap sedang perlu ditingkatkan partisipasinya dalam program Keluarga Bencana (KB) sehingga dapat menjadi desa yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Saifuddin (ed). 2003. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjono.
- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Aprillia Theresia, ddk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*, Bandung:

- Badan Pusat Statistik. 2016. Sulawesi Tenggara dalam Angka 2016. Kendari.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Kecamatan Kusambi dalam Angka 2016. Raha.
- Berartha I Nyoman . 2009. Desa masyarakat desa dan pembangunan desa .Jakarta :Ghalia Indonesia
- Bryant and White, 2004. Pembangunan Masyarakat. LIBERTY Yogyakarta.
- BSPS. 2016. Panduan Teknis : Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016. SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari.
- Darmawi, E. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong. Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, Vol. III (1).
- Deviyanti, D. 2013. Studi tentang Patisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. e-Journal Administrasi Negara, Vol. I (2).
- Dono Susilo. 2004. *Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Program Keluarga Berencana (KB) Mandiri: Studi Tentang Efektivitas KIE untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Program KB Mandiri di Desa Trosemi Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi: UNS.
- Effendi, Bachtiar. (2002). Hal Utama dalam Pembangunan. Andi Offset Yogyakarta.
- Frankisha, C.J., Kwanb, B., Ratner, P.A., Higgins, J. W. dan Larsene, C. 2002. *Challenges of Citizen Participation in Regional Health Authorities. Jurnal of Social Science & Medicine*, No. 54
- Hamijoyo. 2007. Partisipasi dalam Pembangunan. Depdikbud RI. Jakarta.
- Hanapiah, M.A. 2011. Fenomena Pembangunan Desa. Institut Pemerintahan dalam Negeri. Jatinangor. Jawa Barat.
- Hetifah, S.J.S. 2009. Inovasi Partisipasi dan *Good Governance*, (20 Prakarsa Inovatif di Indonesia). Yayasan Obor Indonesia.Jakarta.
- Isbandi, R.A. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan. FISIP IU Press. Depok.
- Isbandi Rukminto, 2007. Pemberdayaan,pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas, lembaga penelitian FE-UI , Jakarta
- I Nyoman, Sumaryadi. 2010. Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah: Jakarta Citra Utama.

- Jefta Leibo. 1990. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Juliantara, 2002. Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Ghalia
- Juliantara, D. 2004. *Pembaharuan Kabupaten. Pembaharuan*. Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 2011. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta CIDES
- Khairuddin, 2005. *Sektsa Kebijakan Desentralisasi*, Averros Press, Malang.
- Kabar Buton. 2016. Program BSPPS 2016, Mubar Kebagian 330 unit. <http://www.kabarbuton.com/berita/program-bsps-2016-mubar-kebagian-330-uni.html>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2016.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.